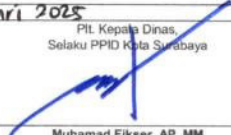
	NOMOR SOP	061.1 / Dinkominfo / EKP / 72						
	TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2025						
	TGL. REVISI							
	TGL. EFEKTIF	02 Januari 2025						
	DISAHKAN OLEH	 Plt. Kepala Dinas Selaku PPID Kota Surabaya Muhamad Fikser, AP, MM Pembina Utama Muda NIP.197405091994121001						
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SERTA STATISTIK								
NAMA SOP		STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI						
DASAR HUKUM :								
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi		1 Lulusan S1						
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		2 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik						
3 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		3 Memahami teknik komunikasi yang baik						
4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya								
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik								
KETERKAITAN :		PERALATAN PERLENGKAPAN :						
		1 Komputer/Laptop						
		2 Jaringan Internet						
		3 Printer						
		4 ATK						
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :						
Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak diperhatikan secara seksama dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik.		-						
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama	Atasan PPID	Pimpinan Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang dikuasai sebagai Informasi yang berpotensi dikecualikan bersama PPID Pambantu	○			Disposisi dan dokumen permintaan Informasi	1 Hari Kerja	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
2	Mengagendakan rapat Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan dengan mempertimbangan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan	□			Surat undangan dan pointer rapat	1 Hari Kerja	Draft lembar pengujian konsekuensi	
3	Pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap dokumen yang berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan dengan mencari dasar hukum yang relevan sebagai dasar hukum pertimbangan merumuskan Informasi tertentu yang dikecualikan beserta dasar hukum, konsekuensi yang ditimbulkan jangka waktu pengecualiannya	□			Surat Dokumen tertentu yang menjadi obyek Informasi yang dikecualikan Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	1 Hari Kerja	Draft lembar pengujian konsekuensi	
4	Merumuskan hasil rapat Uji Konsekuensi dalam format lembar pengujian tentang konsekuensi	□			Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	1 Hari Kerja	Draft lembar pengujian konsekuensi	
5	Melaporkan hasil pengujian konsekuensi dalam format lembar pengujian konsekuensi		□		Lembar Pengujian tentang Konsekuensi dan Surat Pengantar	3 Hari Kerja	Draft lembar pengujian konsekuensi	
6	Melakukan review atas lembar pengujian konsekuensi		□		Surat Persetujuan	1 Hari Kerja	Draft laporan lembar pengujian konsekuensi	
7	Meminta persetujuan atas laporan hasil pengujian tentang konsekuensi			□	Surat Persetujuan dan Draft laporan lembar pengujian konsekuensi	1 Hari Kerja	Draft laporan lembar pengujian konsekuensi	
8	Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik kedalam Penetapan PPID tentang Informasi yang Dikecualikan	□			Surat Persetujuan	1 Hari Kerja	Lembar pengujian konsekuensi	
9	Membuat Penetapan terhadap lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik			○	Penetapan Informasi yang dikecualikan	1 Hari Kerja	SK penetapan klasifikasi informasi dikecualikan	